

# **Islam dan Pluralisme Dalam Pembangunan Politik di Indonesia (Perspektif Pemikiran Abdurrahman Wahid)**

**Musda Asmara**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup  
*muzdasyuhada@gmail.com*

## **Abstract**

*This paper aims to explore the thoughts of Abdurrahman Wahid about Islam and pluralism in political development in Indonesia, referring to the condition of the Indonesian nation that is difficult to live amid a climate of religious plurality, then he voiced the call for peaceful coexistence in the social life of religious communities in Indonesia. For Abdurrahman, with his keen thoughts on religion and nationalism, he directed his thoughts on inclusiveness in religious life. This paper is presented in the literature review. The results can be drawn from this paper, that the pluralism according to Gus Dur, namely the existence of awareness to know each other and dialogue sincerely so that one group with each other take and give. Islam as the majority religion in Indonesia, continued Gus Dur, has important values in creating harmony among peoples and achieve political stability in Indonesia. This idea can be glimpsed in terms of indigenous Islam, democratic values and human rights, humanitarian principles in the plurality of society, the principle of justice, egalitarian*

*Keywords: Islam, Pluralism, political development*

**Keywords:** *Islam, Pluralism, political development*

## **Abstrak**

*Tulisan ini bertujuan untuk mengupas pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Islam dan pluralisme dalam pembangunan politik di Indonesia, merujuk kondisi bangsa Indonesia yang sulit untuk hidup di tengah iklim pluralitas agama, maka beliau menyuarakan seruan hidup berdampingan secara damai dalam kehidupan sosial umat beragama di Indonesia. Bagi Gus Dur, dengan pemikirannya yang tajam tentang agama dan kebangsaan, ia mengarahkan pemikirannya pada sikap inklusif dalam hidup beragama. Tulisan ini disajikan dalam bentuk kajian kepustakaan. Adapun hasil yang dapat ditarik dari tulisan ini, bahwa pluralisme menurut Gus Dur, yaitu adanya kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog secara tulus sehingga kelompok yang satu dengan yang lain saling take and give. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, lanjut Gus Dur, mempunyai nilai-nilai penting dalam menciptakan keharmonisan sesama masyarakat dan meraih kestabilan politik di Indonesia. Idenya ini dapat dilirik dalam istilah pribumisasi Islam, nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, prinsip humanis dalam pluralitas masyarakat, prinsip keadilan dan egaliter.*

**Kata Kunci:** Islam, Pluralisme, Pembangunan Politik

## PENDAHULUAN

Abdurrahman Wahid<sup>1</sup> merupakan tokoh intelektual Muslim Indonesia yang secara giat menyuarakan seruan hidup berdampingan secara damai dalam sosial umat beragama di Indonesia. Bagi Gus Dur, dengan pemikirannya yang tajam tentang agama dan kebangsaan, ia mengarahkan pemikirannya pada sikap inklusif dalam hidup beragama. Pluralisme, haruslah diwujudkan untuk mengembangkan rasa saling pengertian yang tulus dan berkelanjutan, yaitu perasaan saling memiliki (*Sense of Belonging*) dalam kehidupan secara kemanusiaan “Ukhuwah Basyariyah”.<sup>2</sup> Umat Islam sebagai penganut mayoritas haruslah mampu menempatkan ajaran agamanya sebagai faktor komplementer, sebagai komponen yang membentuk dan mengisi kehidupan bermasyarakat warga negara Indonesia.

Pluralisme yang ditekankan Gus Dur adalah pluralisme dalam bertindak dan berpikir. Inilah yang kemudian melahirkan toleransi. Sikap toleran tidak bergantung pada tingginya tingkat pendidikan formal atau kepintaran pemikiran secara alamiah, tetapi merupakan persoalan hati, persoalan perilaku.<sup>3</sup> Menurutnya, berbagai peristiwa kerusuhan yang berkedok agama di beberapa tempat adalah akibat adanya eksklusivisme agama.<sup>4</sup> Apa yang disampaikan oleh Gus Dur sebenarnya lebih merupakan kritik bagi umat Islam sendiri, karena adanya politisasi agama dan pendangkalan agama. Berkenaan dengan makna salah satu ayat al-Qur’an Surat al-Fath (48) ayat 29: “*Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka*”

Ayat ini dipahami Gus Dur bahwa ada perbedaan antara orang non-Muslim sekarang dengan kaum kafir yang memerangi agama Islam (dalam konteks ayat itu adalah kaum kafir Mekkah). Oleh karena itu,

---

<sup>1</sup>Selanjutnya ditulis Gus Dur

<sup>2</sup>Abdurrahman Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan*, (Jakarta: Lappenas, 1981), hlm. 124

<sup>3</sup>Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effeni, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid*, pent. Nanang Tahqiq (Jakarta: Paramadina, 1999), cet. I, hlm. 398

<sup>4</sup>Abdurrahman Wahid, “Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama”, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Passing Over: Melintasi Batas Agama* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm.52

tidak ada alasan untuk mengembangkan sikap permusuhan kepada mereka selama tidak memerangi agama Islam. Selain itu, menurutnya, esensi “saling menyantuni” justru terletak pada sikap-sikap di mana kita bisa saling mengoreksi sesama orang Islam.<sup>5</sup>

Kemudian, Surat al-Baqarah (2) ayat 120: “*Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu*”.

Gus Dur memandang bahwa ayat ini sering digunakan untuk membenarkan sikap dan tindakan anti-toleransi, karena kata “tidak rela” di sini dianggap melawan atau memusuhi, lalu dikaitkan dengan pembuatan gereja-gereja, penginjilan dan sebagainya. Menurutnya, kata “tidak rela” harus didudukkan secara proporsional. Tidak rela itu artinya tidak bisa menerima konsep-konsep dasar. Tentu saja, ini tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Tidak menerima konsep dasar bukan berarti mesti mengembangkan sikap permusuhan atau perlawanan. Kristen dan Yahudi tidak bisa menerima konsep dasar Islam adalah sudah pasti. Begitu juga sebaliknya, Islam juga tidak bisa menerima konsep dasar agama Kristen dan Yahudi. Oleh karena itu, menurutnya, kita tidak akan goyang dari konsep Tauhid, tapi kita menghargai pendapat orang lain.<sup>6</sup>

Pendapat orang lain ini tentu saja berarti keyakinan orang lain. Oleh sebab itu, hal ini menarik untuk dikaji, karena Gus Dur tokoh yang senantiasa mengagungkan kemelut kemanusiaan, karena pikirannya dapat melengkapi konteks masalah pluralisme dalam pembangunan politik di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Dasar Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid

Membicarakan pemikiran politik Gus Dur, tidak bisa terlepas dari kenyataan bahwa ia berada pada posisi *beyond the symbols*<sup>7</sup>, yaitu berbagai macam simbol atau peran melekat pada dirinya. Hal ini disebabkan oleh pemahaman Gus Dur sendiri terhadap realitas sosial yang

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 53

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 53-54

<sup>7</sup>Meminjam judul buku *Beyond the Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur*, (Bandung: INCREs, 2000)

multidimensi, sehingga tanggapan atas realitas tersebut tidak bisa bersifat monolitik. Secara psikologis, Gus Dur besar diantara “tiga dunia”; yakni *pertama*, dunia pesantren yang penuh dengan ortodoksi, berstruktur hirarkis, feodal dan serba mengedepankan etika formal. *Kedua*, dunia Timur Tengah yang terbuka dan keras, dan *ketiga*, budaya Barat yang liberal, rasional dan sekular.<sup>8</sup> Kompleksitas kepribadian inilah, terbentuk perspektif pemikiran dan perhatian yang multidimensi. Mulai dari revivalisme pesantren, kritik pragmatisme pembangunan, pembaruan pemikiran agama, pribumisasi Islam, penjagaan budaya, sistem politik demokratis.

Secara paradigmatik, dasar pemikiran politik Gus Dur berangkat dari kaidah fiqh yang berbunyi: *tashharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuuthun bil mashlahah* (kebijakan seorang pemimpin terkait dengan kemashlahatan rakyat). Bagi muslim, praktik politik terkait dengan amanah, yang tidak hanya mengacu pada kontrak sosial dalam demokrasi, tetapi pertanggungjawaban manusia atas posisi khalifah, langsung dihadapan Tuhan. Kemashlahatan rakyat menjadi pijakan dan arah utama, karena Islam menganut prinsip keadilan (*al-‘adalah*), yang oleh Gus Dur ditempatkan sejajar bersama dengan demokrasi (*syura*) dan persamaan (*al-Musawah*).<sup>9</sup> Tanpa adanya keadilan, sebuah kepemimpinan politik, cacat di mata agama, dan oleh karena itu, halal untuk dilawan, apalagi ketika ketidakadilan itu *merambah* pada penyimpangan syar’i.

Dalam hal inilah, Gus Dur tidak menambatkan tujuan politiknya kepada negara Islam. Karena lanjut Gus Dur, menjadikan Islam sebagai tujuan, akan terjebak pada cita-cita semu, yang menyebabkan perjuangan menjadi simbolis.<sup>10</sup> Ini yang dialami para “pembela Islam”, seperti yang terjadi pada perdebatan Piagam Jakarta di negeri kita. Bagi mereka, yang dinamakan dakwah Islam haruslah secara *letterlijk* memasukkan kata-kata Islam atau syari’at ke dalam konstitusi negara, seperti yang termaktub dalam konstitusi Saudi Arabia, Iran, dan Pakistan.

Dari sini Gus Dur kemudian melakukan rekonstruksi ke dalam, atas bangunan intelektualisme Islam. Ini urgen, sebab perumusan ulang pemikiran Islam merupakan ruang yang tak tergarap dari kebangkitan Islam tersebut, yang karena tak masuk dalam geliat intelektualisme, maka

---

<sup>8</sup>Elsastrow, *Gus, Siapa Sih Sampeyan*, (Jogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 34

<sup>9</sup>Abdurrahman Wahid, *Islam dan Titik Tolak Etika Pembangunan*, Makalah Seminar Pesantren dan Pembangunan, Berlin Barat, Juli 1987

<sup>10</sup>*Ibid*

ia terjebak dalam perjuangan formalistik.<sup>11</sup> Arah ini yang membedakan Gus Dur dengan para “pembela Islam”. Bagi Gus Dur, Islam terlebih adalah soal penguasaan metodologi keilmuan. Fakta ini searah dengan proses Islamisasi awal abad ke-19, ketika jaringan ulama Jawi membawa pembaruan pemikiran Islam, dari Mekkah, ke Nusantara. Inilah cikal bakal pesantren, yang akhirnya melahirkan kekayaan ilmu, sehingga bagi muslim santri, keber-Islaman, adalah penguasaan dan aplikasi dari *manhaj al-fikr*, sehingga Islam mampu menanggapi perubahan zaman.<sup>12</sup>

Pada titik inilah kita akan mengenal konsep kosmopolitanisme dan universalisme Islam milik Gus Dur. Konsepsi ini mengacu pada usaha untuk merumuskan bagaimana pemahaman terhadap ajaran Islam harus bersifat terbuka dengan pemikiran lain. Hanya saja keterbukaan ini bukanlah suatu adaptasi radikal terhadap Barat, tetapi sebuah keterbukaan pemikiran yang ditujukan untuk penggerakan perubahan struktural demi tata hidup berkeadilan.

Kosmopolitanisme peradaban Islam tercapai atau berada pada titik optimal, manakala tercapai keseimbangan antara kecenderungan normatif kaum muslimin dan kebebasan berfikir semua warga masyarakat (termasuk mereka yang non-muslim). Kosmopolitanisme yang seperti itu adalah kosmopolitanisme yang kreatif, karena di dalamnya warga masyarakat mengambil inisiatif untuk mencari wawasan terjauh dari keharusan berpegang pada kebenaran. Situasi kreatif yang memungkinkan pencarian sisi-sisi paling tidak masuk akal dari kebenaran yang ingin dicari dan ditemukan, situasi cair yang memaksa universalisme ajaran Islam untuk terus-menerus mewujudkan diri dalam bentuk-bentuk nyata, bukannya hanya dalam postulat-postulat spekulatif belaka.<sup>13</sup>

Hal sama terlihat dari ketidaksetujuan Gus Dur terhadap pemasukan orang Yahudi dan Nasrani sebagai kafir - suatu kelompok yang memusuhi Islam. Jika al-Qur’an dikaji secara mendalam, akan didapatkan bahwa konsep kafir hanya merujuk pada kelompok yang menolak Tuhan, sementara ahli kitab, dilihat masih memiliki konsep ketuhanan, sehingga tidak bisa dimasukkan dalam kekafiran. Dalam hal ini, Gus Dur kemudian

---

<sup>11</sup>Abdurrahman Wahid, *Kebangkitan Islam Sebagai Titik Tolak Kebangkitan Umat*, Makalah Diskusi Training HMI Badko Jawa Barat, 16 Februari 1981, hlm. 4

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup>Abdurrahman Wahid, *Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam*, Pelita, 26 Januari 1988, hlm. 8

melakukan pembedaan antara defnisi “tegas” sebagai sebuah sikap teologis, dengan tindakan “tegas” sebagai laku kekerasan.<sup>14</sup>

Berangkat dari hal inilah, kosmopolitanisme Islam Gus Dur dikaitkan dengan terma universalisme Islam, sehingga keduanya menjadi satu kesatuan: aplikasi dari ajaran Islam yang universal, tidak akan terjadi tanpa watak terbuka terhadap peradaban lain, yang membuat Islam bersikap secara kosmopolitan. Dua titik ini adalah inti mekanisme dialektik dari pemikiran politik Islam Gus Dur.

Watak terbuka ini memiliki sejumlah unsur dominan, seperti hilangnya batasan etnis, kuatnya pluralitas budaya, serta terciptanya heterogenitas politik. Kosmopolitanisme ini juga menampakkan diri dalam kehidupan beragama yang eklektik selama berabad-abad, baik terhadap sisa-sisa peradaban Yunani Kuno, Persia, hingga peradaban India. Islam dalam sejarahnya telah berdialog dengan peradaban sekular dan mistik, dimana filsafat dan gnostisisme telah menyumbang kontribusi besar bagi rasionalitas dan arah sufisme. Ini yang melahirkan filsafat Islam,<sup>15</sup> serta kecenderungan mistis dalam tasawuf, yang sering dirujuk pada kalangan Syi’ah. Kemampuan Islam dalam berdialog ini menunjukkan sikap terbuka dari metode pemikiran dan kelentukan esoteris, sehingga segenap peradaban yang cenderung tidak searah dengan peradaban fiqh, bisa diterima dan akhirnya membentuk peradaban Islam tersendiri.

Secara sistematis, Gus Dur mendapatkan universalisme Islam tersebut di dalam berbagai jaminan dasar Islam atas ketinggian martabat manusia, yang meliputi:<sup>16</sup>

*Pertama*, jaminan atas keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum. *Kedua*, jaminan atas keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama. *Ketiga*, jaminan atas keselamatan keluarga dan keturunan, yang akan menampilkan sosok moral, baik moral dalam arti kerangka etis maupun kesusilaan. *Keempat*, jaminan keselamatan harta benda dan milik pribadi diluar prosedur hukum, serta jaminan atas keselamatan profesi yang merupakan sarana bagi berkembangnya hak-hak

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 9

<sup>15</sup>Majid Fakhry, *Sejarah Filsafat Islam*, Terj. Mulyadi Kartanegara, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986), hlm. 27

<sup>16</sup>Abdurrahman Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan*, (Jakarta: Leppenas, 1981), hlm. 4-5

individu secara wajar dan proporsional dalam kaitannya dengan hak-hak masyarakat atas individu.

Dari mekanisme dialektik antara kosmopolitanisme Islam di satu sisi, dengan universalisme Islam yang merujuk pada berbagai jaminan atas hak-hak dasarnya manusia, maka tujuan utama dari Gus Dur adalah perubahan sosial menuju pada struktur politik yang lebih berkeadilan. Artinya, usaha untuk membuat Islam lebih terbuka dengan peradaban lain, yang tentunya memiliki konsekuensi penghapusan sikap-sikap eksklusif dan melihat Islam sebagai satu-satunya kebenaran, serta penggerakan perubahan sosial demi pengangkatan martabat manusia.

Sifat populis ini diperkuat oleh peran kyai sebagai *cultural broker*. Peran yang dilihat oleh antropolog Clifford Geertz ini – dikutip dari Talcot Parson, menggambarkan posisi kyai yang tidak terbatas pada pengajar agama, tetapi juga penyaring budaya (dari luar), *plus* komunikator budaya, yang berfungsi sebagai pendamping atas beberapa persoalan kultural masyarakat, semisal konsultasi nikah, perdagangan, waris, dan sebagainya. Hal ini yang membuahkan kharisma, sehingga masukan dan ajaran kyai, diterima masyarakat, sebagai representasi dari “jawaban Tuhan”.<sup>17</sup>

Pada level praktis, hal inilah yang membuahkan magnet dan basis politik, begitu mengakar di kalangan *nahdiyyin*, yang tidak selalu merujuk pada pendaulatan Islam sebagai ideologi politik, tetapi lebih kepada Islam sebagai modal politik. Modal ini tercipta karena keberislaman yang mengakar hingga relung budaya, sehingga apa yang dilakukan dan diperintahkan kyai, bukan hanya terhenti pada perintah normatif, tetapi telah merasuk sebagai “kenyamanan kultural”, dimana muslim *nahdiyyin* merasakan kedamaian batin dalam patronase budaya. Hal ini kemudian memudahkan para politisi NU untuk memobilisir massa politik, hanya berlandaskan dukungan kyai, baik yang individual maupun pemimpin sebuah pesantren.<sup>18</sup>

### **Pluralisme Agama Menurut Abdurrahman Wahid**

Gus Dur mengatakan, demi tegaknya pluralisme masyarakat bukan hanya terletak pada suatu pola hidup berdampingan secara damai, karena

---

<sup>17</sup>Talcot Parson, *Esei-esei Sosiologi*, Terj. S. Aji, (Jakarta: Aksara Persada Press, 1985), hlm. 34

<sup>18</sup>Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm., 28-47

hal itu masih rentan terhadap munculnya kesalahpahaman antar-kelompok masyarakat yang pada saat tertentu bisa menimbulkan disintegrasi.<sup>19</sup> Namun harus ada penghargaan yang tinggi terhadap pluralisme itu, yaitu adanya kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog secara tulus sehingga kelompok yang satu dengan yang lain saling *take and give*.<sup>20</sup>

Islam menurut Gus Dur harus tampil sebagai pemersatu bangsa dan pelindung keragaman dan mampu menjawab tantangan modernitas sehingga Islam lebih inklusif, toleran, egaliter dan demokratis. Nilai Islam yang universal dan esensial lebih diutamakan dari pada legal-simbolis. Islam mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa membawa “embel-embel”<sup>21</sup> Islam, akan tetapi ruh keislaman menyatu dalam wajah nasionalisme, yaitu:

### **1. Pribumisasi Islam**

Proses pertumbuhan Islam sejak Nabi Muhammad, sahabat, para ulama tidak serta merta menolak semua tradisi pra-Islam (dalam hal ini budaya masyarakat Arab pra-Islam). Tidak seluruh sistem lokal ditolak Islam, tradisi dan adat setempat yang tidak bertentangan dengan Islam dapat diinternalisasikan menjadi ciri khas dari fenomena Islam di tempat tertentu.<sup>22</sup> Demikian juga proses pertumbuhan Islam di Indonesia tidak dapat lepas dari budaya dan tradisi masyarakat.

Agama dan budaya bagaikan uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Agama (Islam) bersumberkan wahyu yang bersifat normatif, maka cenderung menjadi permanen. Sedangkan budaya merupakan ciptaan manusia, oleh sebab itu perkembangannya mengikuti zaman dan

---

<sup>19</sup>Umaruddin Masdar, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 145

<sup>20</sup>Abdurrahman Wahid, “Pluralisme Agama dan Masa Depan Indonesia”, makalah pada seminar agama dan masyarakat, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 20-November 1992, hlm. 4

<sup>21</sup>Islamisasi bukan proses Arabisasi tetapi Islamisasi lebih mengutamakan pada manifestasinya nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Selama ini proses Islamisasi belum dipahami betul oleh sebagian besar kaum muslim. Hal ini terlihat misalnya: kata “saudara” tidak perlu diganti “ikhwan”, “langgar” diganti “mushola”, “sembahyang” diubah menjadi “shalat”. Hal ini terlihat bahwa proses Islamisasi baru pada visualisasi: ketidak-pedean umat Islam.

<sup>22</sup>Umaruddin Masdar, *op.cit*, hlm. 141



cenderung untuk selalu berubah. Perbedaan ini tidak menghalangi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya.<sup>23</sup>

Pribumisasi<sup>24</sup> Islam dalam segi kehidupan bangsa merupakan suatu ide yang perlu dicermati. Selanjutnya, Gus Dur mengatakan bahwa pribumisasi bukan merupakan suatu upaya menghindarkan timbulnya perlawanan dari kekuatan-kekuatan budaya setempat, akan tetapi justru agar budaya itu tidak hilang. Inti dari pribumisasi Islam adalah kebutuhan untuk menghindari polarisasi antara agama dengan budaya, sebab polarisasi demikian memang tidak terhindarkan.<sup>25</sup>

Gagasan Gus Dur ini tampak ingin memperlihatkan Islam sebagai sebuah agama yang apresiatif terhadap konteks-konteks lokal dengan tetap menjaga pada realitas pluralisme kebudayaan yang ada. Gus Dur dengan tegas menolak “satu Islam” dalam ekspresi kebudayaan, misalnya semua simbol atau identitas harus menggunakan ekspresi kebudayaan Arab. Penyeragaman yang terjadi bukan hanya akan mematikan kreativitas kebudayaan umat tetapi juga membuat Islam teralienasi dari arus utama kebudayaan nasional. Bahaya dari proses Arabisasi adalah tercabutnya kita dari akar budaya kita sendiri.<sup>26</sup>

Gus Dur menolak adanya pencampuradukan kebudayaan baik oleh kalangan agama maupun kalangan birokrasi karena kebudayaan sangat luas cakupannya yaitu kehidupan sosial manusia (*human social life*) itu sendiri. Birokratisasi<sup>27</sup> kebudayaan yang dilakukan akan menimbulkan kemandekan kreatifitas suatu bangsa. Kebudayaan sebuah bangsa pada hakekatnya adalah kenyataan *pluralistic*, pola kehidupan yang diseragamkan atau dengan kata lain sentralisasi adalah sesuatu yang sebenarnya tidak berbudaya.

Muncul pertanyaan mendasar, mampukah Islam tetap eksis dalam zaman yang serba modern atautkah Islam tenggelam dalam mimpi atas kejayaan para pemikir terdahulu. Menurut Gus Dur, sebagai pemeluk agama yang baik dalam lingkup wawasan kebangsaan akan selalu mengutamakan pencarian cara-cara yang mampu menjawab tantangan

---

<sup>23</sup>Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Depok: Desantara, 2001), hlm. 117

<sup>24</sup>Pribumisasi Islam bukanlah “*Jawanisasi*”, sebab Pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri. *Ibid*, hlm. 119

<sup>25</sup>*Ibid*

<sup>26</sup>Umaruddin Masdar, *op.cit*, hlm. 140

<sup>27</sup>Lihat Abdurrahman Wahid, “Pergulatan Negara...”, *op.cit*, hlm. 5-9

zaman dan lokalitas kehidupan tanpa meninggalkan inti ajaran agama. Selalu ada upaya untuk melakukan reaktualisasi ajaran agama dalam situasi kehidupan yang konkrit, tidak hanya dicukupkan dengan visualisasi yang abstrak belaka. Dalam bahasa lain agama berfungsi sebagai wahana pengayom tradisi bangsa, sedangkan pada saat yang sama agama menjadikan kehidupan berbangsa sebagai wahana pematangan dirinya.<sup>28</sup>

Ada benarnya apa yang dikatakan Greg Barton bahwa Gus Dur merupakan seorang tokoh yang cinta terhadap budaya Islam tradisional (dalam hal ini khazanah pemikiran Islam yang dihasilkan oleh ulama-ulama terdahulu). Namun kecintaan ini bukan berarti keterlibatan dan penerimaan segala aspek budaya tradisional karena Gus Dur sangat kritis terhadap budaya tradisional.<sup>29</sup>

Pribumisasi Islam merupakan upaya dakwah (pola *amar ma'ruf nahi mungkar* diselaraskan dengan konsep *mabadi khaira ummah*). Pelaksanaan kongkritnya adalah menasionalisasikan perjuangan Islam, dengan harapan tak ada lagi kesenjangan antara kepentingan nasional dengan kepentingan Islam.<sup>30</sup> Islam sebagai agama yang diakui di Indonesia selain agama-agama yang lain diaktualisasikan sebagai inspirasi spiritual bagi tingkah laku kehidupan seorang atau kelompok dalam bermasyarakat dan bernegara. Yang dibutuhkan umat Islam Indonesia adalah menyatukan "*aspirasi Islam*" menjadi "*aspirasi nasional*".<sup>31</sup>

"Salah satu wajah ketegangan adalah upaya untuk menundukkan kebudayaan kepada agama melalui proses pemberian legitimasi. Legitimasi diberikan bukan sebagai alat penguat, tetapi sebagai alat pengirim. Proses ini berfungsi melakukan penyaringan terhadap hal-hal yang dipandang sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan agama."<sup>32</sup>

Islam yang merupakan agama<sup>33</sup> *rahmatan lil alamin* haruslah senantiasa memberikan kontribusi dalam menjawab masalah yang timbul

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 4

<sup>29</sup>Greg Barton, "Memahami Abdurrahman Wahid", dalam pengantar *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. xxxvi.

<sup>30</sup>Zainal Arifin Thoha, *Kenyelenehan Gus Dur Gugatan Kaum Muda NU dan Tantangan Kebudayaan*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 205-206

<sup>31</sup>*Ibid.* hlm. 207

<sup>32</sup>Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, *op.cit.*, hlm. 85

<sup>33</sup>Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 167

akibat proses modernisasi. Karena ajaran agama mempunyai peran yang penting dalam berbagai segi kehidupan pemeluknya. Dalam hal ini agama dijadikan tempat mencari jawaban atas problem-problem kehidupan para pemeluknya.<sup>34</sup>

## 2. Nilai-nilai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Demokrasi merupakan salah satu tema besar yang perlu digaris bawahi dari perjuangan dan pemikiran Gus Dur. Bagi Gus Dur, konsep demokrasi adalah konsekuensi logis yang dianggapnya sebagai salah satu dimensi dalam ajaran Islam, yaitu *pertama*, Islam adalah agama hukum, dengan pengertian agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang kelas. *Kedua*, Islam memiliki asas permusyawaratan (*amruhum syuraa bainahum*), artinya adanya tradisi bersama dalam membahas dan mengajukan pemikiran secara terbuka dan pada akhirnya diakhiri dengan kesepakatan. *Ketiga*, Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan.<sup>35</sup>

Ide demokratisasi Gus Dur ini muncul karena ia melihat ada kecenderungan umat Islam Indonesia menjadikan Islam sebagai “alternatif” bukannya sebagai “inspirasi” bagi kehidupan masyarakat. Di sinilah letak permasalahannya, Islam tidak bisa menyatakan sumbangannya lebih besar dan benar dari yang lainnya karena semua pihak sama. Adanya penghargaan terhadap pluralitas dengan menganggap mereka yang berada di luar sebagai orang mandiri.<sup>36</sup>

Dalam rangka pembelaan Gus Dur terhadap demokrasi, ia mengatakan, bahwa di manapun dan kapanpun penegakkan demokrasi dan keadilan terus dilakukan. Ia secara tegas menolak bergabung dengan ICMI<sup>37</sup> dan memelopori berdirinya Forum Demokrasi (ForDem)<sup>38</sup> sekaligus menjadi ketuanya.. Ia sosok yang tak mau menyerah dan terkesan bandel, meskipun keberadaannya di ForDem mendapatkan kritikan tajam dari kyai senior NU dan para cendekiawan Muslim. Nurcholis Majid<sup>39</sup> mengatakan: kalau Gus Dur tidak masuk ICMI, maka

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 38

<sup>35</sup>Abdurrahman Wahid, *Membangun Demokrasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 85

<sup>36</sup>Abdurrahman Wahid, Prisma...,*op.cit*, hlm. 199

<sup>37</sup>Zainal Arifin Thoah, *Jagadnya Gus Dur: Demokrasi, Kemanusiaan dan Pribumisasi Islam*, (Yogyakarta: Kutub, 2003), hlm. 208

<sup>38</sup>Abdurrahman Wahid, *Membangun...*,*op.cit*, hlm. 28

<sup>39</sup>Listiono Santoso, *Teologi Politik Gus Dur*, (Yogyakarta: Ar Ruuz, 2004), hlm.

Gus Dur akan kehilangan basis intelektualnya.” Gus Dur segera menjawab, “sejak kapan ICMI menjadi basis intelektual saya, basis intelektual saya itu di pesantren, kiai pondokan, sekali lagi bukan ICMI.”

Pembelaan terhadap minoritas mendapatkan perhatian yang serius dari Gus Dur. Undang-undang menjamin akan perlakuan yang sama terhadap warga masyarakat untuk berpendapat, keamanan, memilih agama dan pindah agama dan seterusnya. Muslim yang mayoritas harus dapat melindungi mereka yang minoritas.

“...merupakan pengingkaran hakekat demokrasi yang ingin kita tegakkan di negeri ini, karena akan menjadikan mereka yang tidak memeluk agama mayoritas menjadi warga negara kelas dua. Dalam keadaan demikian, persamaan kedudukan semua warga negara di muka undang-undang tidak tercapai.”<sup>40</sup>

Dalam konteks ke-Indonesi-an yang pluralistik hendaknya Islam tidak ditempatkan sebagai ideologi alternatif seperti memposisikan syari’ah berhadapan dengan kedaulatan rakyat. Kontribusi Islam dalam demokrasi bisa dicapai bila dari Islam ditarik sejumlah prinsip universalnya seperti persamaan, keadilan, musyawarah, kebebasan dan *rule of law*, karena dalam satu aspeknya adalah merupakan agama hukum. Pemikiran demokrasi Gus Dur menunjukkan ia telah menerima konsep demokrasi liberal atau parlementer dan secara tegas menolak pemikiran atau “kedaulatan Tuhan” atau pemikiran yang berusaha mengawinkan kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan rakyat, seperti yang dirumuskan oleh Dhiya’ ad-Din Rais.<sup>41</sup>

“Saya bersedia memakai yang manapun asal benar dan cocok dengan hati nurani. Saya tidak memperdulikan kutipan dari injil, Bhagawad Gita kalau benar kita terima. Dalam masalah bangsa ayat-ayat al-Qur’an kita pakai secara fungsional bukannya untuk diyakini secara teologis. Keyakinan teologis dipakai dalam persoalan mendasar. Tetapi aplikasi, soal penafsiran. Berbicara penafsiran berarti bukan lagi masalah teologis tetapi sudah pemikiran.”<sup>42</sup>

Kedaulatan ada di tangan rakyat, ini merupakan kata kunci dari “demokrasi”. Rakyat yang menentukan arah dan haluan negara menuju masa depan dalam kehidupan yang adil dan beradab demi kesejahteraan

---

<sup>40</sup>Abdurrahman Wahid, “Agama dan Demokrasi”, Dalam A. Gaffar Karim, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 1995), hlm. 111

<sup>41</sup>Umaruddin Masdar, *Membaca Pemikiran...*, *op.cit*, hlm.147

<sup>42</sup>Abdurrahman Wahid, *Prisma...*, *op.cit*, hlm. 202

bangsa dan negara. Mereka akan menentukan masa depan bangsa ini. Yang jelas rakyat menginginkan keadilan, kesejahteraan hidup lahir maupun batin, baik secara material maupun spiritual.<sup>43</sup>

### **3. Prinsip Humanis dalam Pluralitas Masyarakat**

Dalam proses demokratisasi ada sesuatu yang tak boleh diabaikan yaitu tentang kemanusiaan, karena hakekat dari demokrasi adalah menempatkan manusia sebagai subjek demokrasi itu sendiri.

“...dari sekarang sebenarnya telah dituntut dari kita kesediaan bersama untuk memperjuangkan kebebasan dan menyempurnakan demokrasi yang hidup di negeri kita. Perjuangan itu haruslah dimulai kesediaan menumbuhkan moralitas baru dalam kehidupan bangsa dan negara dalam kehidupan bangsa, yaitu moralitas yang merasa terlibat dengan penderitaan rakyat di bawah.”<sup>44</sup>

Pandangan Gus Dur tentang kemanusiaan ini muncul karena masih adanya konflik berkepanjangan yang terus terjadi hingga sekarang baik atas nama suku, ras, golongan maupun yang mengatasmakan agama di berbagai pelosok di Indonesia. Konflik yang berkepanjangan ini menunjukkan belum adanya penghargaan terhadap kemanusiaan dan mudahnya orang main hakim sendiri. Dalam hal ini tokoh agama, birokrat, pendidik, tokoh masyarakat berperan terhadap penanaman nilai-nilai agama yang berkaitan dengan moralitas.

Agama samawi yang terakhir (Islam) menurut Gus Dur memuat lima jaminan kemanusiaan. Jaminan itu antara lain: keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum, jaminan atas keyakinan agama masing-masing, keselamatan keluarga dan keturunan, perlindungan harta benda dan milik pribadi.<sup>45</sup> Dari kelima jaminan dasar Islam terhadap kemanusiaan menunjukkan bahwa Islam memperlakukan warga masyarakat tanpa membedakan agama.

### **4. Prinsip Keadilan dan Egaliter**

Demokrasi dikatakan berhasil jika warga masyarakat mendapatkan keadilan. Demokrasi terasa berkeadilan apabila ada kesetaraan (egalitarianisme) warga masyarakat baik di depan undang-undang, hukum maupun dalam lembaga birokrasi dengan mendapatkan hak dan

---

<sup>43</sup>Abdurrahman Wahid, *Membangun...*, *op.cit*, hlm. 115

<sup>44</sup>Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 190

<sup>45</sup>Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, *op.cit*, hlm. 180

kewajiban yang sama tanpa adanya diskriminasi gender, warna kulit, pribumi-keturunan, etnis, ideologi, dan agama.

Jika dikaitkan dengan keadilan, demokrasi hanya dapat tegak dengan keadilan. Kalau Islam menopang demokrasi, maka Islam juga harus menopang keadilan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, “*wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menegakkan keadilan*”. Perintah ini sangat jelas, yakni perlunya ditegakkan keadilan dalam segala bentuk, baik keadilan hukum maupun keadilan sosial. Keadilan sosial ini sangat penting karena salah satu patokan Islam adalah kaidah fiqh: *langkah dan kebijaksanaan para pemimpin mengenai rakyat yang mereka pimpin haruslah terkait sepenuhnya dengan kesejahteraan rakyat yang mereka pimpin itu*. Karena orientasinya adalah kesejahteraan rakyat, maka keadilan sangat dipentingkan. Orientasi kesejahteraan inilah yang membuktikan demokratis atau tidaknya kehidupan suatu masyarakat.<sup>46</sup>

### **Signifikansi Pemikiran Pluralisme Agama Abdurrahman Wahid Dalam Pembangunan Politik di Indonesia.**

Secara institusional, pemikiran Abdurrahman Wahid cukup mewarnai manuver politik NU. Meskipun secara lahiriyah NU merupakan organisasi sosial akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa natural politiknya selalu muncul di tengah-tengah kemelut politik bangsa ini. Hal ini bisa dilihat dari sejarah perjuangannya, pada tahun 1978-an NU yang saat itu masih berafiliasi dengan PPP, dituduh oleh rezim Orde Baru sebagai embrio gerakan anti Pancasila.

Tuduhan itu diangkat dari tindakan protes dan *walk out* para tokoh NU dari sidang MPR yang membahas tentang rancangan ketetapan P4. Menurut Sidney Jones, NU adalah organisasi sosial terbesar di negara ini yang masih memiliki aspirasi-aspirasi politis. Pada tahun 1971 ia menolak untuk mematuhi pedoman-pedoman Orde Baru tentang perilaku politik, kemudian pada tahun 1981 NU juga menolak mendukung Soeharto untuk menjabat kembali atau memberinya gelar “Bapak Pembangunan”.<sup>47</sup> Perilaku inilah yang membuat NU menjadi sasaran tuduhan anti Pancasila oleh rezim Soeharto.

---

<sup>46</sup>Abdurrahman Wahid, *Membangun....op.cit*, hlm. 86

<sup>47</sup>Douglas E. Ramage, *Percaturan Politik di Indonesia: Demokrasi, Islam, dan Ideologi Toleransi*, Terj. Hartono Hadikusumo, (Jogjakarta: Mata Bangsa, 2002), hlm. 56

Pemikiran liberal Gus Dur sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan Ormas Islam ini, meskipun ada juga beberapa pemimpin NU terkemuka yang tidak sepakat dengan pemikirannya, di antaranya para Kyai dan tokoh senior NU, termasuk pamannya, Yusuf Hasyim, yang seringkali menentang inisiatif dan pernyataan-pernyataannya. Untuk itu, implikasi pemikiran Gus Dur terhadap NU ini tampaknya harus dilihat dari aspek nasionalisme dan Islam.

NU menurut Gus Dur, mempunyai akar fondasi nasionalis yang kuat sebagaimana yang telah dikatakan ayahnya (Wahid Hasyim), bahwa ia bersedia mendukung suatu negara nasionalis non-Islami. Selain itu, Gus Dur juga sering menekankan aspek-aspek nasionalis NU. Misalnya, dalam sebuah pidato penting kepada anggota-anggota NU pada tahun 1992, ia mengingatkan bahwa penerimaan NU kepada Pancasila bisa diterima karena beberapa alasan. Dia menjelaskan bahwa pada tahun 1945 Soekarno meminta nasihat para pemimpin NU, termasuk ayahnya untuk membantu Soekarno merumuskan lima asas Pancasila. Lebih dari itu, Gus Dur menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada kontradiksi antara Islam dan nasionalisme, karena Islam tetap bisa berkembang dalam suatu negara nasionalisme yang tidak didasarkan pada Islam.<sup>48</sup>

Akibat dari pemikirannya yang bisa dikatakan nasionalis-Islam, akhirnya pada tahun 1983 Nahdlatul Ulama menjadi Ormas Islam besar pertama yang menerima Pancasila dalam Anggaran Dasarnya, yang kemudian dipertegas kembali pada Muktamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur bahwa Indonesia adalah negara yang didasarkan Pancasila, dan UUD 1945 adalah merupakan “Bentuk Final dari Negara” yang akan memerintah kepulauan Indonesia. Perlu diingat bahwa pernyataan tersebut ditegaskan di tengah-tengah iklim politik yang saat itu benar-benar dalam keadaan memanas antara Islam dan negara, yakni pasca peristiwa Tanjung Priok dan pengeboman di Jakarta.<sup>49</sup>

Sebenarnya yang mengeluarkan inisiatif kompromi Pancasila di atas adalah Kyai Ahmad Shidiq, dan Gus Dur sendiri dalam membentuk dwitunggal yang bertanggung jawab bagi transformasi dan revitalisasi NU sebagai basis kekuatan Islam yang pluralis dan neo-modernis. Sebelumnya Ahmad Shidiq pernah menjelaskan bahwa NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal karena merupakan hasil filsafat manusia, sementara Islam merupakan wahyu Tuhan.

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 94-95

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm. 97

Selain berimplikasi di NU, pemikiran Gus Dur juga banyak mempengaruhi visi dan misi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang ia pelopori sendiri. Maka tidaklah mustahil kalau PKB selama ini tetap menempatkannya sebagai Dewan Pertimbangan Penting di partai ini. PKB dipelopori oleh K.H. Ilyas Ruchiyat, K.H. Munasir Ali, K.H. Mustofa Bisri, K.H. Muchit Muzadi, dan K.H. Abdurrahman Wahid.<sup>50</sup> Melihat komposisi dari para pelopor di atas, sangatlah *absurd* kalau PKB tidak terkait sama sekali dari kepentingan NU, sebab sebagian besar yang membidani pembentukan partai ini adalah dari kalangan Kyai NU, ditambah lagi Gus Dur yang saat itu sebagai Ketua Umum PBNU, meskipun masih juga terdapat *pro-kontra* dalam pembentukannya. Pembentukan PKB merupakan upaya jalan tengah warga NU untuk berjuang di garis struktural politik, dengan seraya melakukan gerakan kultural melalui NU yang tetap dipertahankan sebagai organisasi sosial keagamaan (*Jam'iyah Diniyyah*) seiring dengan perubahan yang terjadi di pentas nasional.

Kekonsistenan pemikiran para tokoh NU, termasuk Gus Dur, masih tetap bertahan dalam memberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal di era reformasi ini, meskipun saat itu rezim Orde Baru telah jatuh dan eforia politik Islam sedang mendapatkan kebebasannya. Di lain kesempatan, Gus Dur yang saat itu didampingi oleh Matori Abdul Djilil pernah menyatakan, bahwa PKB bukanlah partai Islam dan merupakan partai yang menginginkan negara sekuler.<sup>51</sup>

Dari sini bisa dilihat seberapa jauh implikasi pemikiran Gus Dur terhadap strategi perjuangan partai ini. Sebagaimana uraian di atas bahwa implikasi pemikiran Gus Dur ini tidak lepas dari aspek nasionalisme dan Islam, yang keduanya itu tampak dalam AD/ART PKB yang menjadikan Pancasila sebagai asas partai.<sup>52</sup> Mengenai dipilihnya nasionalisme dan demokrasi yang dijadikan landasan dasar PKB dari pada dasar agama, Gus Dur mengatakan bahwa PKB mengutamakan kepentingan nasional.<sup>53</sup>

PKB senantiasa mengutamakan substansi Hukum Islam melalui Hukum Nasional dan bukan mengutamakan simbol-simbol formal

---

<sup>50</sup>Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik: Pasca-Soeharto*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003), hlm. 113

<sup>51</sup>Bahrul Ulum, dkk., *Bodohnya NU apa NU Dibodohi?, Jejak Langkah NU Era Reformasi: Menguji Khittah Meneropong Paradigma Politik*, (Yogyakarta: Kutub, 2002), hlm. 136

<sup>52</sup>Lihat, Anggaran Dasar PKB BAB III Pasal 3

<sup>53</sup>Bahrul Ulum, *op.cit*, hlm. 140



keagamaan, karena Republik Indonesia adalah sebuah negara dengan kepentingan-kepentingan nasional dan bukan sebuah negara agama.<sup>54</sup> Sedangkan dari sisi Islamnya, bagi Gus Dur bukan berarti karena PKB tidak mengusung simbol-simbol Islam kemudian dikatakan partai yang tidak Islami.

Dalam kaitan ini Gus Dur mengatakan:

“Tidak penting bagi PKB berasaskan Islam. Yang penting PKB adalah Partai Islam. Banyak partai yang berasaskan Islam, tapi mereka main tipu, main curang dan tidak berakhlak Islami. Islam hanya dijadikan mereknya saja. Jadi, parpol berasaskan Islam tidak bisa dibuat jaminan. Dan PKB tidak mementingkan mereknya, tapi isinya.<sup>55</sup> “Akhlak dari Tauhid PKB adalah Islam. Dari pada parpol yang berasas Islam tapi tidak Islami, maka lebih baik seperti PKB, asas bukan Islam, tetapi kelakuan dan tauhidnya orang Islam.<sup>56</sup>

Pemikiran-pemikiran Gus Dur tampaknya banyak mewarnai perjuangan PKB, di mana sebuah partai yang *nota bene* berbasiskan muslim santri pedesaan ternyata mampu membuat mereka (konstituennya) menerima pendekatan partai yang bersifat nasionalis atau Islam-kultural dibanding Islam-formal. Pemakaian Pancasila sebagai asas partai dilandasi oleh cara pandang tokoh PKB dalam melihat Islam, mereka meyakini bahwa Islam tidak perlu dilembagakan secara formal, tetapi yang penting adalah nilai ajaran Islam harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari.<sup>57</sup>

Selain dari aspek institusional di atas, pemikiran Gus Dur juga mempunyai implikasi yang bersifat personal terhadap tokoh-tokoh politik dan pemikir Indonesia, Alwi Shihab merupakan salah satu politisi sekaligus akademisi yang sedikit banyak mempunyai persamaan visi dan misi dengan Gus Dur tentang pluralisme agama, sebagaimana yang sering dikatakan Gus Dur mengenai demokrasi, Alwi juga menandakan agama idealnya dapat mendorong proses demokratisasi bukan malah menjadi alat legitimasi politik.<sup>58</sup>

---

<sup>54</sup>Abdurrahman Wahid, PKB, “Syariah dan Negara Sekuler”, dalam tulisannya, *Mengurai Agama dan Negara*, hlm. 352-353

<sup>55</sup>*Republika*, 27 Mei 1999. Lihat juga Zainal Abidin Amir, *op.cit.*, hlm. 114

<sup>56</sup>*Jawa Pos*, 29 Mei 1999

<sup>57</sup>Zainal Abidin Amir, *op.cit.*, hlm. 114.

<sup>58</sup>Alwi Shihab, *Mengemban Tuntutan Zaman*, (Yogyakarta: Wahyu Pustaka, 2000), hlm. 60

Istimewanya, Alwi Shihab dinilai mampu menerjemahkan pola pemikiran Gus Dur, sehingga banyak kalangan yang menganggap kedua tokoh ini merupakan duet yang ideal.<sup>59</sup> Di samping itu, ia juga dikenal sebagai politisi yang mengedepankan etika dan moralitas. Mengenai visi dan misinya dalam PKB, ia menyatakan bahwa partai ini merupakan partai terbuka dan inklusif yang bercita-cita mewujudkan masyarakat bermoral, bukan membentuk sebuah negara yang berdasarkan syari'at Islam.<sup>60</sup>

Menurutnya, apabila masyarakat telah menerapkan moralitas tentunya akan membentuk negara yang bermoral pula. Bukan bentuk, sistem atau asas yang diutamakannya, tetapi yang terpenting adalah usaha untuk menanamkan substansi dan esensi Islam dalam menciptakan masyarakat yang beradab.<sup>61</sup> Lebih lanjut, Alwi mengatakan bahwa agama dan demokrasi juga sangat berkaitan, karena nilai-nilai substansi tersebut telah mendukung proses demokrasi, di antaranya yaitu keadilan, pemerataan, dan persamaan. Sekali lagi, ia menegaskan bahwa tujuan Islam adalah menciptakan masyarakat yang bermoral bukan menciptakan negara agama karena hanya akan memecah belah keutuhan bangsa saja, maka ide semacam itu harus ditinggalkan.<sup>62</sup>

Mengenai eksistensi agama di Indonesia, penulis buku Islam Inklusif (1997) ini, tidak jauh berbeda dengan pemikiran Gus Dur. Baginya Islam adalah agama *rahmatan li al-'alamin*. Jadi tidak perlu menggunakan kekerasan dalam mendakwahkan ajaran Islam, seperti yang dilakukan kalangan Islam radikal. Dalam acara silaturahmi warga NU dan PKB di Jember, Alwi Shihab meminta pada seluruh umat Islam *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* untuk berhati-hati terhadap berkembang Islam radikal, menyusul banyaknya pengeboman yang dilakukan Islam radikal itu. Katanya, kita adalah satu-satunya partai yang memiliki otoritas keagamaan yang dapat menekan radikalisme ini.<sup>63</sup>

Untuk itu, ia juga sepakat kalau Syari'at Islam tidak perlu diundang-undangkan di negara ini, karena hanya akan memicu disintegrasi bangsa yang plural ini. Selain itu, meskipun Islamlah yang mayoritas di negara ini, namun dalam kenyataannya tidak semua orang Islam Indonesia

---

<sup>59</sup>Kompas Harian Amanat Rakyat, *PKB Rekrut Nur Mahmudi juga Tokoh-tokoh Muhammadiyah*, Selasa, 4 Februari 1999

<sup>60</sup>Alwi Shihab, *op.cit*, hlm. 60

<sup>61</sup>*Ibid*

<sup>62</sup>*Ibid.*, hlm. 62

<sup>63</sup>*Ibid.*

mengerti dan menjalankan 'Aqidah dan Syari'ah-nya. Padahal Islam dalam mensyiarkan Syari'ah-nya itu selalu bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan manusia itu sendiri.<sup>64</sup>

Selain Alwi Shihab, banyak generasi muda NU yang saat ini masih terus mencoba mengembangkan pemikiran-pemikiran Gus Dur, baik dalam memahami agama maupun negara (politik). Salah satunya adalah Ulil Abshar Abdallah, ia dikenal sebagai intelektual muda yang sangat kontroversial di kalangan NU, meskipun ia tidak akrab dengan dunia politik praktis tetapi kekritisannya mengenai pluralisme agama menyegarkan kembali pemahaman wacana Islam di negara kita yang cenderung membeku baginya.

Pemikirannya sempat mengundang reaksi keras para tokoh Islam Indonesia yang tergabung dalam FUI, yang sampai mengeluarkan fatwa hukuman mati untuknya. Sebenarnya ada beberapa pokok pikiran Ulil yang secara esensial sama dengan pemikiran Gus Dur, seperti Pribumisasi Islam, Islam kontekstual, dan Islam Universal.

Beberapa pemahaman yang menurut Ulil perlu disegarkan kembali, di antaranya yaitu:<sup>65</sup> *Pertama*, penafsiran Islam yang non-literal, substansial dan sesuai dengan peradaban manusia yang selalu berubah. *Kedua*, pemisahan unsur-unsur budaya lokal dan nilai fundamental dalam ajaran Islam, artinya kita harus membedakan mana ajaran dalam Islam yang merupakan pengaruh kultur Arab dan yang bukan. Misalnya, masalah jilbab, potong tangan, rajam, jenggot, Jubbah dan ekspresi budaya Arab lainnya. Bagi Ulil budaya semacam itu tidak wajib diikuti, karena itu hanyalah ekspresi lokal partikular Islam Arab saja, justru yang wajib diikuti adalah nilai universal yang melandasi praktik-praktik itu. *Ketiga*, perlu adanya pemisahan yang jelas antara kekuasaan politik dan agama. Bagi Ulil agama adalah urusan pribadi, sedangkan pengaturan kehidupan publik adalah sepenuhnya hasil konsesi masyarakat melalui prosedur demokrasi. Meskipun demikian nilai-nilai universal agama tetap diharapkan partisipasinya dalam membentuk nilai-nilai publik.

Dalam wawancara yang dilakukan majalah Gatra, mengenai tuntutan pemberlakuan syariat Islam oleh negara. Ulil mengatakan bahwa Islam sebagai agama adalah masalah privat.<sup>66</sup> Oleh sebab itu menurutnya, Islam

---

<sup>64</sup>*Ibid.*

<sup>65</sup>Ulil Abshar Abdalla, dkk., *Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam*, dalam tulisannya, *Islam Liberal dan Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana*, cet. ke-2 (Yogyakarta: eLSAQ, 2003), hlm. 2

<sup>66</sup>Majalah GATRA, *Tafsir Agama Pemicu Fatwa*, No. 05, 16 Desember 2002

tidak perlu memformalkan Syari'at Islam, karena hanya akan melibatkan peran negara (*publik*) secara penuh terhadap kehidupan beragama kita (*privat*), dan kemungkinan yang lebih parah lagi adalah terjadinya penyempitan pemahaman dan penyeragaman umat Islam dalam beragama, padahal perbedaan itu sendiri adalah *sunnatullah*.

Selanjutnya ia mengkritik secara tegas terhadap cara pandang yang menyebutkan Islam adalah agama dan negara. Baginya agama haruslah dipisahkan dari peran negara sebagaimana yang ia uraikan di atas, agar kesucian agama tetap terjaga.<sup>67</sup> Hal ini sesuai dengan apa yang Gus Dur cita-citakan selama ini bahwa umat Islam tidak harus menjadikan Islam sebagai *merk* atau label belaka, akan tetapi lebih ditekankan pada nilai-nilai substansinya karena kita hidup di negara yang sangat plural agama dan budayanya, dan tentunya sangat berbeda dengan tradisi Arab di sana.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Islam dan pluralisme dalam pembangunan politik di Indonesia menurut Gus Dur, dapat dilihat dalam dua hal, yaitu latar belakang pemikiran Gus Dur tentang pluralisme agama di Indonesia beranjak dari kenyataan, bahwa sudah begitu banyak kekejaman dan kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya di Indonesia khususnya. Itu dilakukan justru dengan justifikasi yang berasal atas ajaran agama-agama tertentu. Apalagi agamalah tampaknya yang paling sering menjadi alat politik untuk membenarkan kelompok sendiri, serta menyalahkan kelompok lainnya. Padahal, lanjut Gus Dur, setiap orang beragama umumnya sepakat, bahwa pesan inti agama adalah memelihara kehidupan damai serta saling mengasihi antar sesama manusia. Apabila yang terjadi adalah sebaliknya dari pesan-pesan pokok setiap agama, tentulah telah terjadi kesalahpahaman antar pemeluk agama. Untuk itulah, Gus Dur menawarkan ide pluralisme agama ini dalam rangka menciptakan kemesraan antar sesama bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan. Pluralisme menurut Gus Dur, adanya kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog secara tulus sehingga kelompok yang satu dengan yang lain saling *take and give*. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, lanjut Gus Dur, mempunyai nilai-nilai penting dalam menciptakan

---

<sup>67</sup>Majalah TEMPO, *Fatwa Itu Lemah Tapi Menghawatirkan*, No. 42, 22 Desember 2002

keharmonisan sesama masyarakat dan meraih kestabilan politik di Indonesia. Idenya ini dapat dilirik dalam istilah pribumisasi Islam, nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, prinsip humanis dalam pluralitas masyarakat, dan prinsip keadilan serta prinsip egaliter.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abshar Abdalla, Ulil, dkk. *Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam*, dalam tulisannya, *Islam Liberal dan Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana*, cet. ke-2. Yogyakarta: eLSAQ, 2003.
- Amir, Zainal Abidin. *Peta Islam Politik: Pasca-Soeharto*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003.
- Barton, Greg. *Gagasan Islam Liberal Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effeni, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid*, pent. Nanang Tahqiq. Jakarta: Paramadina, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Elsastrow. *Gus, Siapa Sih Sampeyan*. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- E. Ramage, Douglas . *Percaturan Politik di Indonesia: Demokrasi, Islam, dan Ideologi Toleransi*, Terj. Hartono Hadikusumo. Jogjakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Fakhry, Majid. *Sejarah Filsafat Islam*. Terj. Mulyadi Kartanegara, Jakarta: Pustaka Jaya, 1986.
- Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gaus AF (ed.). *Passing Over: Melintasi Batas Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Majalah GATRA, *Tafsir Agama Pemicu Fatwa*, No. 05, 16 Desember 2002.
- Majalah TEMPO, *Fatwa Itu Lemah Tapi Menghawatirkan*, No. 42, 22 Desember 2002.
- Masdar, Umaruddin. *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Parson, Talcot . *Esei-esei Sosiologi*, Terj. S. Aji. Jakarta: Aksara Persada Press, 1985.
- Santoso, Listiono. *Teologi Politik Gus Dur*. Yogyakarta: Ar Ruuz, 2004.
- Shihab, Alwi. *Mengemban Tuntutan Jaman*. Yogyakarta: Wahyu Pustaka, 2000.\8
- Thoha, Zainal Arifin. *Kenyelenehan Gus Dur Gugatan Kaum Muda NU dan Tantangan Kebudayaan*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.

- \_\_\_\_\_. *Jagadnya Gus Dur: Demokrasi, Kemanusiaan dan Pribumisasi Islam*. Yogyakarta: Kutub, 2003.
- Turmudi, Endang. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Ulum, Bahrul, dkk., *Bodohnya NU apa NU Dibodohi?, Jejak Langkah NU Era Reformasi: Menguji Khittah Meneropong Paradigma Politik*. Yogyakarta: Kutub, 2002.
- Wahid, Abdurrahman. *Islam dan Titik Tolak Etika Pembangunan*, Makalah Seminar Pesantren dan Pembangunan, Berlin Barat, Juli 1987.
- \_\_\_\_\_. *Kebangkitan Islam Sebagai Titik Tolak Kebangkitan Umat*, Makalah Diskusi Training HMI Badko Jawa Barat, 16 Februari 1981.
- \_\_\_\_\_. *Muslim di Tengah Pergumulan*. Jakarta: Lappenas, 1981.
- \_\_\_\_\_. “Pluralisme Agama dan Masa Depan Indonesia”, makalah pada seminar agama dan masyarakat, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 20-November 1992.
- \_\_\_\_\_. *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*. Depok: Desantara, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam* Pelita, 26 Januari 1988.
- \_\_\_\_\_. *Muslim di Tengah Pergumulan*. Jakarta: Leppenas, 1981.
- \_\_\_\_\_. PKB. “Syariah dan Negara Sekuler”, dalam tulisannya, *Mengurai Agama dan Negara*.
- \_\_\_\_\_. *Membangun Demokrasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- \_\_\_\_\_. “Agama dan Demokrasi”, Dalam A. Gaffar Karim, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 1995.
- \_\_\_\_\_. *Tuhan Tidak Perlu Dibela*. Yogyakarta: LKiS, 1999.